



Kabupaten Kutai Kartanegara
Kecamatan Muara Muntai

RKT 2026

RENCANA KERJA TAHUNAN
KECAMATAN MUARA MUNTAI
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 selesai disusun dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) berisi materi Rencana Strategis yang didalamnya memuat visi dan misi yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2030 dapat berjalan dengan efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga dapat mempercepat terwujudnya Good Governance di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semoga Rencana Kerja Tahunan ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan urusan wajib dan non urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dan tentunya mendukung tercapainya Visi Kabupaten Kutai Kartanegara.



Muara Muntai, Desember 2025.

MULYADI, SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP.19700205 200012 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerpan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerinntah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Muara Muntai menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 yang dimaksudkan sebagai perwujudan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang ditetapkan

1.2. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Muntai adalah sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2026. Dengan demikian , rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan Dokumen dasar dalam penentuan keberhasilan kinerja Kecamatan Muara Muntai.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Muntai adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan capaian kinerja Tahun 2026 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia dengan tujuan antara lain :

- a. Sebagai dokumen dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Tahun 2026.
- b. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026.

Penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Rencana Kerja Tahunan (Renja) OPD yang mempunyai keselarasan rumusan dengan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara RENSTRA OPD dan Renja, RKT OPD, maka dokumen Rencana Kinerja Tahunan haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari RENSTRA OPD tersebut seperti isu-isu strategis. Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah Kecamatan Muara Muntai yaitu :

- a. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategis akan menuntun diagnose organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
- b. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2026.
- c. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Kecamatan Muara Muntai adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Kecamatan Muara Muntai tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah,

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Muntai menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Muntai selama tahun 2026.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Muntai tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. RKT Indikator Kinerja Utama Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Target	Satuan
1	Meningkatnya Layanan Administrasi di Kecamatan	1. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No.4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pedum terkait perhitungan di Permen PAN RB No. 5 Tahun 2023	2,10 (C-)	Indek
		2. Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang sesuai SOP	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100	100	Persen
		3. Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	Penilaian Keuangan : 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web (20%) Cara hitung : (jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di kecamatan). 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdес secara 100% (15%)	95	Persen

			Cara Hitung :Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi/jumlah desa dikec 3. Persentase realisasi anggaran minimal 90 % (20%) Cara Hitung :jumlah Desa dengan anggaran yang terealisasi minimal 90%/ jumlah desa Penilaian Administrasi : 1. Penyampaian Perdes LPPD, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%) cara Hitung : jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret/ jumlah desa di kec 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) Cara Hitung : Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa 3. Pengisian Prosdeskel dan Sdgs (10%) cara hitung : Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa 4. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%) . Cara hitung : Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kec)		
--	--	--	---	--	--

Tabel 2. RKT Program Tahun 2026

No	Program	Indikator	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,77
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100
		Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	Persen	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100

4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persen	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100

Tabel 3. RKT Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2026

Kode Rek	Program/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0
7.01.01.2.01.03	oordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2
7.01.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	13
7.01.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokum	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2
7.01.01.02.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	14
7.01.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bln	708

7.01.01.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
7.01.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12
7.01.01.02.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1
7.01.01.02.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	25
7.01.01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
7.01.01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
7.01.01.02.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0
7.01.01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12
7.01.01.02.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	50
7.01.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0
7.01.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0
7.01.01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0
7.01.01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0
7.01.01.02.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Layanan	
7.01.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1

7.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
7.01.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
7.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
7.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1
7.01.01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1
7.01.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40
7.01.01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	50
7.01.01.02.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	11
7.01.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	0
7.01.01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0
7.01.01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1
7.01.01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0
7.01.01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0
7.01.01.02.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12
7.01.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
7.01.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
7.01.01.02.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	20
7.01.01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10

7.01.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10
7.01.01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10
...	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0
7.01.01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0
7.1.202.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	3
7.1.202.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2
7.1.202.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1
7.1.202.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	SPM	3
7.1.202.02.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2
7.1.202.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2
7.1.202.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	4
7.1.202.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	37
7.1.302.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi dalam rangka pemberdayaan desa yang dilaksanakan.	Kali	12
7.1.302.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan	2
7.1.302.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	Laporan	2

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7.1.302.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	
7.1.302.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	2
7.1.302.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	0
7.1.402.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	2
7.1.402.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
7.1.402.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2
7.1.502.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	2
7.1.502.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	1100
7.1.502.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1
7.1.602.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan	2
7.1.602.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	4
7.1.602.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	4

BAB III

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Muntai Tahun 2026 ini disusun sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan diakhir tahun 2026 terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Muntai.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Muntai Tahun 2026 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahunan Kecamatan Muara Muntai Tahun 2026, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Muntai, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas terhadap masyarakat dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



Muara Muntai, Desember 2025.

MULYADI, SE., M.Si
Pembina Tingkat I / IV b
NIP.19700205 200012 1 003